
Peningkatan Daya Saing Wilayah Berbasis Potensi Ekonomi Lokal

oleh:

*) Faradillah Herlin, S.E., M.E.

**) Dosen Tetap STIE Muhammadiyah Jambi

Abstrak

Region development policy must be oriented to increase competitiveness base on local economic potential. The policy purposed is support sustainable development process. So need to identification effort for potential commodity base on local economic potential and agribusiness development policy is integrated to get this purpose, must be used industry cluster approach.

Keywords : *Region, Development, Agribusiness*

PENDAHULUAN

Menurut **Nasoetion** (1992), bias kebijakan pembangunan yang hanya bertumpu pada kemampuan sektoral, bila ditinjau dari **logical frame work** ekonomi wilayah (**regional economie**) akan menimbulkan dua masalah. **Pertama**, kemungkinan terjadinya disintegrasi struktur perkonomian, dalam pengertian struktur perekonomian cenderung lebih berkembang dan terpusat hanya pada satu wilayah. Bila hal itu berlangsung dalam jangka panjang dapat menimbulkan hubungan yang bersifat eksploitatif antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. **Kedua**, dikhawatirkan akan terjadi misalokasi sumberdaya nasional yang disebabkan kurang dimanfaatkannya keunggulan komparatif wilayah (**regional competitive advantage**), sehingga untuk jangka panjang akan melemahkan potensi suatu wilayah untuk berkembang.

Guna mengeliminir kemungkinan yang demikian maka dalam kebijakan pembangunan wilayah harus ada perhatian terhadap potensi ekonomi lokal (**local spesific**) guna meningkatkan dan mengoptimalkan potensi wilayah. Pembangunan wilayah tidak hanya sekedar memanfaatkan keunggulan komparatif (**comparative advantage**) tetapi juga harus menciptakan keunggulan kompetitif (**competitive advantage**) yang tinggi. **Porter** (1990) mengatakan bahwa faktor keunggulan komparatif telah dikalahkan oleh kemajuan teknologi. Oleh sebab itu, setiap wilayah tidak seharusnya hanya mengandalkan keunggulan komparatifnya yang didasarkan pada biaya produksi yang murah, tetapi lebih dari itu, yaitu

harus adanya inovasi (**innovation**) dalam mengembangkan potensi ekonomi khususnya yang berbasis potensi ekonomi lokal.

Bila perhatian terhadap hal tersebut dilakukan secara sistimatis dan konsisten maka dalam proses pembangunan wilayah, sumberdaya alam dan faktor produksi lainnya yang murah bukanlah menjadi andalan utama.

Bila **logical frame work** demikian diaplikasikan dalam kerangka pembangunan wilayah di Indonesia maka sesuai dengan karakteristik potensi wilayah, perhatian terhadap pengembangan agribisnis menjadi lebih urgen. Pada saat ini diperlukan suatu kebijakan yang sistimatis, simultan dan komprehensif dalam pengembangan agribisnis. Terutama yang terkait dengan pengidentifikasian secara tepat komoditas unggulan yang akan dikembangkan serta sistim dan kelembagaan pendukungnya. Kondisi ini pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan daya saing wilayah yang berbasis pada potensi ekonomi lokal. Konsep pembangunan wilayah demikian pada dasarnya akan berorientasi pada upaya menjaga keberlanjutan pembangunan wilayah (**sustainable development**)

Peningkatan Daya Saing Wilayah

Konsepsional

Berbagai konsep daya saing wilayah telah dikemukakan oleh berbagai ahli dan institusi. Menurut **Porter** (1990), konsep daya saing wilayah merupakan cerminan produktifitas yang didefinisikan sebagai nilai output yang dihasilkan seorang tenaga kerja. Pada sisi lain konsep daya saing **World Bank** mengacu kepada besaran serta laju perubahan nilai tambah per unit input yang dicapai oleh satuan wilayah pembangunan. Ini berarti, kedua definisi di atas menyatakan bahwa daya saing tidak hanya sebatas tingkat efisiensi pada satuan wilayah pembangunan tetapi juga mencakup aspek di luar satuan wilayah pembangunan seperti **business environment, firm-specific, region-specific country-specific** yang merupakan faktor di luar kendali.

Institute of Management Development (IMD), lembaga yang menerbitkan “**World Competitiveness Yearbook**” mendefinisikan daya saing wilayah sebagai kemampuan suatu wilayah dalam menciptakan nilai tambah dalam rangka menambah kekayaan dengan cara mengelola aset dan proses, daya tarik dan agresivitas, **globality** dan **proximity** serta dengan mengintegrasikan hubungan-hubungan tersebut ke dalam suatu model ekonomi dan sosial. Melengkapi konsep daya saing wilayah IMD di atas, Departemen Perdagangan

dan Industri Inggris (UK-DTI) menyatakan bahwa daya saing wilayah merupakan kemampuan suatu wilayah dalam menghasilkan pendapatan dan kesempatan kerja tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan domestik dan internasional.

Konsep daya saing wilayah yang terkait dengan **region development** dinyatakan oleh **World Economic Forum (WEF)**, lembaga yang menerbitkan “**Global Competitiveness Report**”, mendefinisikan daya saing wilayah sebagai kemampuan perekonomian wilayah mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan menjamin keberlanjutan pembangunan (**sustainability development**). Komponennya meliputi kebijakan-kebijakan yang tepat, institusi yang sesuai, karakteristik ekonomi yang mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan tersebut. Dalam konsep WEF inilah, khususnya yang berkenaan dengan karakteristik ekonomi, pengembangan potensi ekonomi lokal memegang peranan berarti terutama dalam kaitannya dengan keberlanjutan proses pembangunan.

Mengacu pada beberapa konsep daya saing wilayah di atas, maka pemahaman atas daya saing wilayah perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Cakupan daya saing lebih luas dan tidak sebatas produktifitas atau efisiensi.
2. Pelaku ekonomi (**economic agent**) berada dalam sistem ekonomi yg bersinergi.
3. Hakikat daya saing adalah kompetisi. Oleh karena itu daya saing tidak akan pernah ada pada suatu perekonomian yang tertutup

Sasaran peningkatan daya saing wilayah dalam perekonomian adalah bermuara pada meningkatnya tingkat kesejahteraan penduduk dan terjadinya keberlanjutan dalam proses pembangunan (**sustainability development**).

Faktor Yang Mempengaruhi Keunggulan Daya Saing Wilayah

Keunggulan daya saing wilayah menurut **Porter** (1990) ditentukan oleh empat faktor pokok dan dua faktor penunjang. Empat faktor pokok yang dimaksud adalah kondisi faktor produksi (**factor condition**), kondisi permintaan pasar (**demand condition**), industri-industri terkait dan industri pendukung (**related and supporting industries**) serta strategi perusahaan, struktur dan persaingan (**firm strategy, structure and rivalry**). Sedangkan faktor penunjangnya adalah peluang (**chance**) dan peranan pemerintah (**role of government**).

Secara ringkas komponen tersebut akan diilustrasikan.

1. Kondisi Faktor Produksi

Faktor produksi yang diperlukan dalam menciptakan keunggulan daya saing :

- a. Sumberdaya manusia, indikatornya kuantitas, kualitas, gaji, standar jam kerja dan etika kerja.
- b. Sumberdaya alam yang berupa ketersediaan lahan, indikatornya kuantitas, kualitas, aksesibilitas, harga tanah, air, mineral, serta iklim dan lokasi.
- c. Sumberdaya pengetahuan, indikatornya jumlah ilmuwan dan teknokrat.
- d. Sumberdaya modal, indikatornya jumlah dan besarnya investasi yang disediakan untuk mendukung produk-produk unggulan suatu wilayah.
- e. Infrastruktur wilayah, indikatornya jenis, kualitas dan biaya penggunaannya, termasuk sistem jaringan transportasi, telekomunikasi dan energi.

Hirarki faktor produksi perlu dibuat untuk mengetahui peranan faktor produksi di dalam menciptakan keunggulan daya saing wilayah. Hirarki tersebut dapat dikelompokkan ke dalam **basic factors** dan **advanced factors**. Penciptaan faktor produksi (**factor creation**) merupakan hasil diciptakan melalui investasi. Dalam penciptaan keunggulan daya saing wilayah, maka jauh lebih baik dan lebih utama melalui mekanisme penciptaan faktor-faktor produksi dibandingkan dengan faktor-faktor yang diwariskan (**basic factor**).

Suatu wilayah yang sukses dalam industrinya adalah wilayah yang mampu menciptakan dan mengembangkan **factor creation**. Wilayah itu akan memiliki keunggulan daya saing bila dapat menciptakan faktor-faktor produksi yang terspesialisasi (**specialized factors**). Penentuan tipe dari faktor produksi yang akan diciptakan dan dikembangkan dan seberapa besar efektifitasnya sangat tergantung pada kondisi permintaan lokal, keberadaan industri pendukung dan industri terkait, tujuan perusahaan dan karakteristik persaingan domestik.

2. Kondisi Permintaan Pasar

Karakteristik kondisi permintaan pasar adalah hal yang penting dalam menciptakan keunggulan daya saing wilayah, yaitu:

- a. Komposisi permintaan pasar domestik. Makin besar segmentasi pasar suatu wilayah maka akan lebih mudah wilayah tersebut memperoleh keunggulan daya saing.

- b. Ukuran dan pola pertumbuhan permintaan pasar domestik meliputi ukuran permintaan pasar domestik, jumlah pembeli bebas, laju pertumbuhan permintaan pasar domestik, permintaan awal pasar domestik dan titik jenuh awal.
- c. Internasionalisasi permintaan pasar domestik. Komposisi permintaan pasar domestik merupakan akar keunggulan suatu wilayah, sementara ukuran dan pola pertumbuhan permintaannya dapat memperkuat keunggulan dengan cara mempengaruhi perilaku investasi, waktu dan motivasi atau melalui mekanisme internasionalisasi permintaan pasar domestik dan mendorong pemasaran produk ke luar negeri.

3. Industri-industri pendukung dan industri terkait.

Industri-industri pemasok yang mempunyai keunggulan daya saing akan memberikan potensi keunggulan bagi industri di suatu wilayah. Kehadiran industri yang bersaing secara global dalam suatu wilayah pada bidang atau sektor yang berkaitan dengan industri lain dapat memberikan keunggulan daya saing bagi industri tersebut.

4. Strategi perusahaan, struktur dan persaingan.

Faktor penentu ini meliputi strategi dan struktur perusahaan domestik, tujuan perusahaan dan individu serta persaingan domestik.

5. Peluang.

Suatu sistem akan terbentuk dari resultante faktor penentu keunggulan daya saing wilayah. Sistem tersebut dapat terganggu oleh sesuatu sebab baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Misalnya, tindakan penemuan (**invention**), perubahan besar dalam bioteknologi dan mikroelektronik, terjadinya perubahan besar dalam biaya input dan terjadinya perang serta bencana alam.

6. Peranan Pemerintah.

Pada dasarnya peranan pemerintah hanya sebatas mempengaruhi kondisi faktor produksi, kondisi permintaan pasar dan mengatur perdagangan. Pengaruh yang dapat diberikan pemerintah terhadap keempat faktor pokok penentu keunggulan daya saing adalah sebagai berikut:

- a. Kondisi faktor produksi dipengaruhi melalui kebijakan-kebijakan publik seperti subsidi dan kebijakan pendidikan.

- b. Kondisi permintaan pasar dipengaruhi melalui penentuan standar produk lokal.
- c. Industri-industri terkait dan pendukung di dalam suatu wilayah dipengaruhi dengan melakukan pengontrolan terhadap media periklanan maupun melakukan regulasi yang diperlukan.
- d. Strategi perusahaan, struktur dan persaingan dipengaruhi melalui berbagai perangkat lunak seperti regulasi pasar modal, kebijakan pajak dan *antitrust*.

Tahap Perkembangan Keunggulan Daya Saing Wilayah

Perkembangan keunggulan daya saing dapat dikelompokkan ke dalam empat tahap, yaitu **factor-driven**, **investment-driven**, **innovation-driven** dan **wealth-driven**. Tiga tahapan yang pertama menggambarkan peningkatan keunggulan daya saing suatu wilayah, sedangkan tahap yang terakhir merupakan tahap di mana wilayah sudah mengalami penurunan keunggulan daya saingnya.

Pada tahap **factor-driven**, keunggulan daya saing suatu wilayah sebagian besar bersumber dari **basic factor**, seperti sumberdaya alam berlimpah dan tenaga kerja murah. Sedangkan pada tahapan **investment-driven**, keunggulan daya saing muncul karena dipacu oleh investasi yang besar dari perusahaan lokal dan transnasional dalam rangka membangun industri berteknologi tinggi, berskala besar, modern dan efisien. Pada tahap ini belum sampai pada tahap **state-of-the-art**.

Pada tahap **innovation-driven**, sumber keunggulan daya saing suatu wilayah berasal dari tingkat produktifitas tenaga kerja yang terampil dan pemanfaatan teknologi tinggi yang telah mencapai tahap **state-of-the-art**. Pada tahap ini suatu wilayah tidak hanya mampu melakukan **improvement** terhadap teknologi yang sudah ada, tetapi juga sanggup menciptakan teknologi baru. Tahap terakhir **wealth-driven** merupakan tahap keunggulan daya saing mulai menurun karena tingkat kemakmuran masyarakatnya sudah tercapai.

Dalam upaya meningkatkan keunggulan daya saing maka suatu wilayah harus:

1. Mengupayakan meningkatnya penciptaan faktor produksi yang potensial dan berspesifikasi lokal
2. Meningkatkan motivasi bekerja, keuntungan serta skala usaha
3. Meningkatkan persaingan domestik
4. Meningkatkan kualitas permintaan
5. Meningkatkan kemampuan menciptakan peluang-peluang usaha baru.

Konsep Pembangunan Wilayah dan Komoditas Unggulan

Konsep Pembangunan Wilayah

Konsep pengembangan wilayah secara umum terbagi atas empat, yaitu (**Komet**, 2000):

1. Pengembangan wilayah berbasis sumberdaya

Sumberdaya merupakan semua potensi yang dimiliki oleh alam dan manusia. Bentuk sumberdaya tersebut yaitu tanah, bahan mentah, modal, tenaga kerja, keahlian, keindahan alam maupun aspek sosial budaya.

2. Pengembangan wilayah berbasis komoditas unggulan

Penekanan konsep ini pada motor penggerak pembangunan wilayah pada komoditas yang dinilai dapat menjadi unggulan atau andalan, baik di tingkat domestik dan internasional.

3. Pengembangan wilayah berbasis efisiensi

Penekanan pada konsep ini adalah pengembangan wilayah melalui pembangunan bidang ekonomi yang mempunyai porsi lebih besar dibandingkan bidang-bidang lainnya. Pembangunan ekonomi tersebut dijalankan dalam kerangka pasar bebas atau pasar persaingan sempurna (**free market mechanism**).

4. Pengembangan wilayah menurut pelaku pembangunan

Strategi pengembangan wilayah ini mengutamakan peranan setiap pelaku pembangunan ekonomi (rumah tangga, lembaga sosial, lembaga keuangan dan bukan keuangan, pemerintah maupun koperasi).

Konsep Kompetensi Inti (*Core Competence*)

Kompetensi inti dalam konteks pengembangan wilayah merupakan upaya dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan sektor-sektor yang berkembang di wilayah tertentu. Semakin baik pengkoordinasian dan pengintegrasian tersebut maka akan semakin tinggi upaya penciptaan kompetensi inti, yang berimplikasi pada sulitnya wilayah lain untuk bersaing dengannya. Keunggulan bersaing atau daya saing suatu wilayah tercipta jika kawasan tersebut memiliki kompetensi inti (**core competence**) yang dapat dibedakan dari wilayah lainnya. Kompetensi inti dapat diraih melalui **creation of factor**, yaitu upaya menciptakan berbagai faktor produksi yang jauh lebih baik dibandingkan para pesaingnya.

Kawasan atau wilayah yang telah mencapai tahapan kompetensi inti memiliki empat atribut, yaitu (**Board**, 1993):

1. Kemampuan untuk memberikan akses pada variasi pasar yang lebih luas
2. Kemampuan memberikan kontribusi yang signifikan kepada persepsi pelanggan atas manfaat yang diperoleh dari barang dan jasa yang ditawarkan.
3. Kemampuan menghasilkan barang dan jasa unggulan yang sangat sulit ditiru akan menciptakan hambatan masuk (**entry barriers**) bagi kawasan lain untuk memberikan layanan serupa.
4. Kemampuan melakukan koordinasi yang kompleks dari beragam teknologi dan keahlian terapan.

Suatu wilayah akan memiliki daya saing jika pengambil keputusan dan dunia usaha dapat mengkaji bagaimana suatu kompetensi inti dan peluang ekonomi suatu wilayah dapat disesuaikan dengan permintaan pasar lokal dan ekspor. Untuk mengadakannya memerlukan dukungan **market intelligence** yang mampu memandang ke depan mengenai pasar serta mampu mengantisipasi adanya kecenderungan perubahan pola konsumsi dan ekspor.

Dengan pemberian otonomi yang besar pada daerah, maka di masa datang keberhasilan pengembangan wilayah sangat tergantung pada kebijaksanaan pemerintah daerah terutama dalam menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi. Setiap pemerintah daerah harus mampu mengembangkan visi pengembangan wilayahnya sesuai dengan nilai, arah dan tujuan yang akan mengarahkan masa depan wilayah yang bersangkutan. **Porter** (1990) menyatakan strategi pengembangan yang didasarkan pada tenaga kerja yang murah serta besaran skala ekonomi tertentu (**economic of scale**) merupakan paradigma yang sudah usang. Adapun paradigma terbaru adalah dengan pendekatan inovasi dan pembaharuan.

Penguatan kapasitas pada tingkat lokal dapat dicapai dengan memaksimalkan keunggulan potensi lokal dan masyarakat sebagai pelaku kunci dalam mengkaitkan komponen-komponen kunci pembentuk daya saing wilayah. Dalam rangka penguatan keunggulan potensi lokal ini maka pengembangan kluster industri (**industry cluster**) merupakan salah satu alternatif yang sangat efektif dikembangkan saat ini.

Identifikasi Potensi Wilayah dan Komoditas Unggulan Berspesifikasi Lokal

Berbeda dengan **conventional approach** perencanaan fisik wilayah, yang menekankan pada kepadatan penduduk, jumlah penduduk dan struktur kota-kota,, pendekatan baru yang populer digunakan saat ini lebih mengutamakan pada konsentrasi wilayah produksi dan komoditas unggulan guna mendukung pembangunan berkelanjutan. Berkenaan dengan hal tersebut maka perlu dipahami beberapa kriteria komoditas unggulan berikut ini (Alkadri, 2001):

1. Harus mampu menjadi penggerak utama (**prime mover**) pembangunan ekonomi wilayah. Komoditas unggulan tersebut harus dapat memberikan kontribusi signifikan pada peningkatan produksi, pendapatan dan pengeluaran.
2. Mempunyai keterkaitan ke depan dan ke belakang (**forward and backward linkages**) yang kuat, baik sesama komoditas unggulan maupun komoditas lainnya.
3. Mampu bersaing dengan produk sejenis dari wilayah lain (**competitiveness**) di pasar nasional dan pasar internasional, baik dalam harga produk, biaya produksi dan kualitas pelayanan.
4. Memiliki keterkaitan dengan wilayah lain (**regional linkages**), baik dalam hal pasar (konsumen) maupun pemasokan bahan baku.
5. Memiliki status teknologi (**state-of-the-art**) yang terus meningkat, terutama melalui inovasi teknologi.
6. Mampu menyerap tenaga kerja berkualitas secara optimal sesuai dengan skala produksinya.
7. Dapat bertahan dalam jangka panjang, mulai dari fase kelahiran (**increasing**), pertumbuhan (**growth**) hingga fase kejenuhan (**maturity**) atau penurunan (**decreasing**). Jika komoditas unggulan yang satu memasuki tahap kejenuhan atau penurunan maka komoditas unggulan lainnya harus mampu menggantikannya.
8. Tidak rentan terhadap gejolak eksternal dan internal.
9. Pengembangannya berorientasi pada pembangunan berkelanjutan melalui penjagaan kelestarian sumberdaya dan lingkungan.

Agropolitan, Agribisnis dan Industri Kluster

Agropolitan Dan Agribisnis

Konsep pengembangan agropolitan pertama kali diperkenalkan **Mc.Douglass** dan **Friedmann** (1974, dalam Pasaribu, 1999) sebagai siasat untuk pengembangan perdesaan. Konsep ini pada dasarnya memberikan pelayanan perkotaan di kawasan perdesaan atau dengan istilah lain yang digunakan oleh **Friedman** adalah "kota di ladang". Dengan demikian petani atau masyarakat desa tidak perlu harus pergi ke kota untuk mendapatkan pelayanan, baik yang berhubungan dengan masalah produksi dan pemasaran maupun masalah kebutuhan sosial budaya dan kehidupan setiap hari. Pusat pelayanan diberikan pada setingkat desa, baik pelayanan mengenai teknik berbudidaya pertanian maupun kredit modal kerja dan informasi pasar.

Dalam konsep agropolitan juga diperkenalkan **agropolitan district**, suatu daerah perdesaan dengan radius pelayanan 5-10 km dan dengan jumlah penduduk 50-150 ribu jiwa serta kepadatan minimal 200 jiwa/km². Jasa-jasa dan pelayanan yang disediakan disesuaikan dengan tingkat perkembangan ekonomi dan sosial budaya setempat.

Konsep lainnya yang sangat terkait dengan agropolitan adalah Agribisnis. Agribisnis merupakan suatu sistem yang terdiri atas subsistem hulu, usahatani, hilir, dan penunjang. Menurut **Saragih** (1998, dalam Pasaribu 1999), agribisnis adalah sistem yang utuh dan saling terkait di antara seluruh kegiatan ekonomi (yaitu subsistem agribisnis hulu, subsistem agribisnis budidaya, subsistem agribisnis hilir, subsistem jasa penunjang agribisnis) yang terkait langsung dengan pertanian. Agribisnis diartikan sebagai sebuah sistem yang terdiri dari unsur-unsur kegiatan : (1) pra-panen, (2) panen, (3) pasca-panen dan (4) pemasaran. Sebagai sebuah sistem, kegiatan agribisnis tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, saling menyatu dan saling terkait. Terputusnya salah satu bagian akan menyebabkan timpangnya sistem tersebut.

Kegiatan agribisnis melingkupi sektor pertanian, termasuk perikanan dan kehutanan, serta bagian dari sektor industri. Sektor pertanian dan perpaduan antara kedua sektor inilah yang akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik secara nasional (**Sumodininggat**, 2000). Perkembangan agribisnis di Indonesia sebagian besar telah mencakup subsistem hulu, subsistem usahatani, dan subsistem penunjang, sedangkan subsistem hilir masih belum berkembang secara maksimal.

Agropolitan perlu diposisikan secara sinergis dalam sistem pengembangan wilayah. Implementasi konsep agropolitan dalam pengembangan wilayah dilakukan melalui penerapan sistem pemukiman kota dan pedesaan serta Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK) yang terkait dengan kawasan budidaya dan sistem transportasi.

Klaster Industri

Michael Porter dari Harvard University merupakan pemikir terdepan yang mengembangkan konsep kluster industri. Keberhasilan ekonomi lokal dan regional sangat tergantung kepada investasi yang inovatif, perusahaan-perusahaan yang memiliki keunggulan dan dukungan kualitas infrastruktur sosial dan ekonomi. Istilah **‘industry cluster’** kerap digunakan secara bergantian dengan **‘industry precinct’**. Konsep kluster industri menyangkut dimensi spasial yang lebih luas dan bukan hanya pengembangan properti semata.

Definisi kluster industri yang paling sederhana dikemukakan oleh **Dorienger** dan **Terkla** (1995) sebagai berikut **“geographical concentrations of industries that gain performance advantages through co-location”**. Definisi ini serupa dengan ekonomi aglomerasi, namun pada kenyataannya dalam kluster industri yang diamati adalah aglomerasi ekonomi di dalam kluster industri. Porter mempopulerkan konsep kluster industri dalam bukunya *The Competitive Advantage of Nations* (1990). Porter mengembangkan **“Diamond of Advantage”** seperti yang dikemukakan terdahulu untuk menentukan apakah perusahaan dan industri dalam suatu wilayah mempunyai keunggulan kompetitif. Salah satu faktor kunci penentu keberhasilan kluster industri adalah keberhasilan suatu wilayah dalam mengidentifikasi keberadaan kluster industri yang akan dikembangkan.

Pendekatan pengembangan industri dengan klaster merupakan suatu pendekatan yang relatif baru diaplikasikan dalam pengembangan industri dalam konteks pembangunan wilayah. Selama ini pendekatan yang dilakukan lebih menekankan pada sentra. Pada pendekatan sentra ada kecenderungan pemerintah hanya lebih fokus memperhatikan aktivitas sentra industri tanpa perhatian terhadap industri terkait lainnya, baik yang memiliki keterkaitan kebelakang (***backward linkage***) yang akan bersifat mendorong (***push***

factor) maupun keterkaitan kedepan (*forward linkage*) yang bersifat menarik (*pull factor*).

Dalam pendekatan klaster ini orientasi kebijakan lebih ditekankan pada kelompok industri unggulan yang berbasis potensi lokal dengan satu usaha inti (*core business*) yang saling berhubungan secara intensif dan membentuk kerjasama (*partnership*), baik dengan dukungan (*supporting*) industri maupun yang terkait dengan industri lainnya (BPS-KPKM, 2001). Manfaat yang diperoleh dengan menggunakan pendekatan klaster ini adalah mendorong spesialisasi produksi dan mengubah keunggulan komparatif (*comparative advantage*) menjadi keunggulan kompetitif (*competitive advantage*). Dengan demikian, dalam pendekatan klaster, industri yang dibina akan memiliki efisiensi yang tinggi dalam proses produksinya. Efisiensi tersebut tercipta dari berkurangnya biaya transportasi (*transportation cost*) dan transaksi (*transaction cost*).

Secara lebih fokus, ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan berkenaan dengan pengembangan dalam konsep klaster industri unggulan yang berbasis potensi lokal dalam konteks pembangunan wilayah berkelanjutan ini:

1. Harus dilakukan pemilahan kebijakan antara klaster industri yang memiliki keunggulan alamiah (*natural advantage*) yang berdasarkan sumber daya (*resources based*) dengan yang memiliki keunggulan komparative (*comperative advantage*) karena akan berkenaan dengan tingkatan nilai tambah (*vallue added*) yang diciptakan dan kontinuitas usaha.
2. Klaster industri yang dikembangkan pada setiap pusat pertumbuhan (*growth pole*) pada wilayah ekonomi harus bersifat *cluster* sehingga terjadi keterkaitan antar industri (*linkage inter industries*). Sedangkan hubungan industri pada setiap pusat pertumbuhan (*growth pole*) harus bersifat *integrated industries plant*. Hal ini bertujuan untuk mempercepat terjadinya proses penciptaan modal baru (*capital formation*).
3. Dalam konteks pembangunan wilayah, guna mendorong perkembangan klaster industri, maka pemerintah daerah harus mampu menciptakan iklim kondusif sehingga tercipta persaingan (*perfect competition*) guna mengurangi ekonomi biaya tinggi (*hight cost economy*).
4. Pada tahap lebih lanjut, perlu dipersiapkan klaster industri yang berorientasi ekspor khususnya klaster industri yang mempunyai daya saing pasar yang tinggi.

Ada beberapa alternatif strategi yang dapat diaplikasikan dalam rangka pengembangan klaster industri berbasis potensi lokal. Setiap strategi yang dikembangkan tentu saja telah memenuhi persyaratan konsep klaster yaitu adanya keterkaitan yang saling mempengaruhi antar industri.

A. Integrated Model

Salah satu strategi alternatif yang dapat dipilih dalam pengembangan industri klaster dinamakan dengan integrated model. Dalam model ini strategi pengembangan difokuskan secara terintegrasi pada setiap klaster industri yang ada. Pada setiap industri hulu, industri inti, industri hilir dan pada level konsumen harus teridentifikasi permasalahan yang disertai solusinya. Pemerintah dalam hal ini harus mampu berperan sebagai mediator dalam mengkoordinir institusi yang berperan positif. Dalam model ini, pada setiap klaster akan ditemui institusi yang memberikan layanan dalam pengembangan usaha yang disebut dengan *Business Development Service/BDS*.

Dikarenakan pendekatan ini bersifat terintegrasi maka kecenderungan timbulnya keterkaitan yang kuat antar industri dimungkinkan terjadi. Untuk itu guna menghindari timbulnya hubungan yang tidak kondusif perlu dibina pola hubungan **kemitraan** (*partnership*). Melalui pola kemitraan ini diharapkan adanya kejelasan sistim tataniaga, kestabilan harga dan kontinuitas bahan baku.

Keunggulan dari pendekatan ini adalah semua klaster industri yang ada pada saat bersamaan mendapatkan solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian antar satu klaster industri akan bersifat mendorong kemajuan klaster lainnya. Sehingga perkembangan klaster industri akan menjadi lebih cepat secara bersamaan.

Kelemahan strategi ini adalah dibutuhkan dana, tenaga ahli (konsultan) dan sumber daya lainnya pada saat bersamaan dalam jumlah besar dalam satu paket program. Bila dalam operasionalnya terjadi hambatan (dana, tenaga ahli, sumber daya lainnya) maka tahapan operasional yang telah dilakukan akan menjadi sia-sia.

B. Industries Growth Pole

Strategi alternatif pengembangan *industries growth pole* merupakan suatu strategi pengembangan klaster industri yang memfokuskan pengembangan pada pusat-pusat pertumbuhan industri yang terpilih. Pusat pertumbuhan industri yang terpilih pada setiap

klaster akan distimulus dengan beberapa kebijakan berdasarkan identifikasi permasalahan yang dihadapi.

Perkembangan industri pada pusat-pusat pertumbuhan pada setiap klaster industri diharapkan mampu memberi dampak pada industri lainnya. Bila setiap klaster industri pada tiap pusat pertumbuhan telah mampu berkembang maka diharapkan terjadi interaksi antar pusat pertumbuhan. Secara makro interaksi secara simultan pada tiap pusat pertumbuhan industri akan memberi perkembangan positif secara komprehensif terhadap pembangunan wilayah.

Tidak berbeda dengan pendekatan terdahulu, pada *industries growth pole* ini juga diharapkan peranan *business development service*. Pada sisi lain, peranan pemerintah hanya bersifat mediator dan dinamisator. Bantuan pemerintah tidak boleh diberikan secara langsung pada klaster industri tapi hanya bersifat stimulus pada institusi yang diharapkan punya peranan langsung.

Keunggulan pendekatan ini adalah tidak memerlukan dana, waktu dan sumber daya yang terlalu besar. Perkembangan klaster industri terjadi dengan sendiri melalui perkembangan yang terjadi pada pusat pertumbuhan. Adapun yang mungkin dapat dikatakan kelemahan dalam pendekatan ini adalah tuntutan ketepatan mengidentifikasi pusat pertumbuhan. Kesalahan penentuan pusat pertumbuhan industri berdampak pada ketimpangan interaksi antar klaster industri yang ada pada pembangunan wilayah.

C. Pilot Project

Strategi pengembangan lainnya dinamakan dengan *pilot project*. Pada setiap klaster hanya dipilih satu industri yang dijadikan sebagai proyek percontohan. Pada satu industri tersebut akan diidentifikasi permasalahan dan dicarikan solusinya secara komprehensif. Kebijakan yang diambil diasumsikan sebagai kebutuhan yang ada secara umum pada tiap industri.

Keunggulan model ini adalah pemerintah hanya fokus pada satu klaster industri sehingga tingkat keberhasilan pada industri yang dijadikan pilot project relatif besar. Hal ini dikarenakan semua sumber daya yang ada dicurahkan demi keberhasilan proyek percontohan tersebut termasuk memberikan peranan pada *business development service*. Namun pertanyaan yang muncul adalah seberapa bisa industri lain dapat melakukan hal yang sama seperti pada proyek percontohan, dengan segala keterbatasan yang dimilikinya.

Ini berarti, pendekatan ini dapat dilakukan bila diasumsikan bahwa setiap industri yang ada memiliki kemampuan untuk melakukan hal yang sama untuk mengembangkan kluster industri.

KESIMPULAN

Dalam konteks pembangunan wilayah saat ini perlu dilakukan reorientasi kebijakan terutama yang berkenaan dengan pendekatan yang digunakan. Selama ini pembangunan wilayah hanya terfokus pada keunggulan komparatif (**comparative advantage**) yang lebih berbasis pada potensi sumber daya alam (**resources based**). Kelemahan pada pendekatan ini adalah penciptaan nilai tambah yang rendah dan lemahnya daya saing produk yang dihasilkan. Akumulasi dari kondisi ini berdampak terhadap proses pembangunan yang akan menjadi stagnan. Guna mengarahkan proses pembangunan yang berkelanjutan (**sustainability development**) maka pengembangan daya saing wilayah yang berbasis potensi ekonomi lokal (**local spesification**) harus sudah menjadi perhatian. Penerapan pendekatan ini tentu saja harus dilakukan secara komprehensif. Dimulai dari pengidentifikasian komoditas unggulan dalam konteks agribisnis, pengembangan kelembagaan hingga pada strategi pengembangan. Melalui pendekatan ini diharapkan terciptanya produk unggulan yang berspesifikasi lokal yang memiliki **competitive advantage** dan memiliki **value added** besar. Bila proses ini tercapai maka pembangunan berkelanjutan juga akan tercapai.



DAFTAR PUSTAKA

- Alkadri, 2011. Manajemen Teknologi untuk Pengembangan Wilayah. Edisi Revisi. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Jakarta.
- BPS KPKM, 2011. Bahan Work Shop Pelaksanaan Program LPB/BDS, BPS KPKM, Jakarta
- Daryanto, A. and J.B. Morison. 1992. "Structural interdependence in the Indonesian economy, with emphasis on the agricultural sector, 1971-1985: An input-output analysis". *Mimbar Sosek* 6

Doeringer, P.B., and D.G. Terkla. 1995. "Business strategy and cross-industry clusters." *Economic Development Quarterly* 9: 225-37.

Komet, M. 2000. *Perencanaan Terpadu Pembangunan Ekonomi Daerah Otonom*, BPS. Jakarta.

Nasoetion, L.I. 1992. Beberapa Hasil Kajian Penerapan Konsep dan Metode Pengembangan Wilayah dalam Pembangunan Indonesia. Makalah disampaikan pada Pentaloka Managemen Area, Kanwil Pertanian NTB, Mataram, 20-26 April 1992.

Porter, M.E. 2000. *The Competitive Advantage of Nations*. The Free Press. New York.